

## **Kontribusi Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam Merespons Isu Keislaman Dan Keumatan Di Pamekasan Madura**

**Abd A'la**

UIN Sunan Ampel – Surabaya  
abadalabs@yahoo.com

**Ahwan Mukarrom**

UIN Sunan Ampel – Surabaya  
ahwanmukarrom1952@yahoo.com

**Mukhammad Zamzami**

UIN Sunan Ampel – Surabaya  
mukhammadzamzami@gmail.com

### **Abstract**

This article analyzes the contributions of the *kiais* who are members of the Aliansi Ulama Madura (AUMA) in responding to Islamic and publicity issues in the Pamekasan region. This organization was born after the stagnation of the Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) organization in guarding the issues of religiousness and Islam. They are committed to fighting for Islamic *da'wah* which is *kāffah*; an agenda to optimize the concept of *amr ma'rūf nahy munkar* collectively and sincerely in order to uphold the motto of the development of Pamekasan based on Islam. In the field of Islam, their vision is to anticipate and avoid Indonesia, especially the Madurese, from all kinds of deviations of teachings and religious beliefs, both Shī'ah, Wahabi, Liberal, and Blasphemy (SYIBILIP). Not only in the field of Islam, but this organization also contributes in the political sphere. This can be referred to the strategic roles and functions of those who actively involve themselves in many political dynamics, both at the regional and central levels. At the regional level, the political roles and strategic functions of these organizations are clearly illustrated in the

political cooperation they build with elite political parties at the regional level. While at the national level, the strategic role of this organization is indicated by their involvement in national leadership contestation.

[Artikel ini menganalisis kontribusi para ulama yang tergabung dalam wadah Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam merespons isu keislaman dan keumatan di wilayah Pamekasan. Organisasi ini lahir pasca mandeknya organisasi Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) dalam mengawal isu keumatan dan keislaman. Mereka berkomitmen memperjuangkan dakwah Islam *kāffah*; sebuah agenda menjalankan *amr ma'rūf nahy munkar* secara kolektif dan demi menegakkan jargon pembangunan Pamekasan yang berasaskan Islam. Dalam bidang keislaman, visi mereka adalah mengantisipasi dan menghindarkan Indonesia, khususnya masyarakat Madura, dari segala ragam deviasi ajaran dan paham keagamaan, baik Shī'ah, Wahabi, Liberal, dan penistaan agama (SYIBILIP). Tidak hanya bidang keislaman, AUMA juga bergerak di wilayah politis. Hal ini dapat dirujuk pada peran dan fungsi strategis mereka yang aktif melibatkan diri dalam banyak dinamika politik, baik di level daerah maupun pusat. Di level daerah, peran dan fungsi strategis politik organisasi ini terilustrasi secara jelas dalam kerja sama politik yang mereka bangun bersama elit partai politik di tingkat daerah. Sedangkan di level nasional, peran strategis organisasi ini mereka tunjukkan melalui keterlibatan diri dalam kontestasi kepemimpinan nasional.]

**Keywords:** Aliansi Ulama Madura (AUMA), Islam *kāffah*, *amr ma'rūf nahy munkar*.

## Pendahuluan

Secara sosiologis, realitas pemikiran dan gerakan kelompok keagamaan Pamekasan jauh lebih dinamis dibandingkan dengan daerah Madura lain, seperti Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Pembedanya terletak pada tipologi keagamaan masyarakat di sana yang lebih heterogen, di mana ada beragam organisasi keislaman yang mewarnai dinamika perkembangan keislaman. Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, beberapa organisasi keagamaan eksis dan tumbuh di sana, seperti al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Hidayatullah, dan Sarekat Islam (SI). Dari keenam ormas tersebut, terdapat tiga ormas

Islam yang hingga sekarang tercatat sebagai kelompok paling dominan. Ketiganya adalah NU, SI, dan Muhammadiyah.<sup>1</sup> Dari ketiga ormas ini, NU dan SI memiliki misi penyebaran dan gerakan relatif sama, di mana keduanya bermuara pada eksistensi pesantren. Sedangkan Muhammadiyah—sebagaimana ciri kulturalnya yang khas—tetap berakar pada sistem pendidikan modern. Dengan dua perbedaan ini, wajar jika kebanyakan pengikut NU dan SI di Pamekasan lebih banyak di dominasi masyarakat tradisional. Sebaliknya, kelompok Muhammadiyah lebih banyak berasal dan bertempat di perkotaan, seperti Kecamatan Kota Pamekasan. Namun, berdasarkan hasil riset Abd Hannan (2017), belakangan ini peta penyebaran Muhammadiyah di Pamekasan telah merengsek masuk ke pelosok desa, seperti di kecamatan Tlanakan, Galis, Pademawu, Pakong, Waru, dan Pasean.<sup>2</sup> Eksistensi beberapa organisasi inilah yang cukup mewarnai dinamika pemikiran dan pergerakan keislaman di Pamekasan.

Pasca-reformasi dan lengsernya rezim Orde Baru era Suharto,<sup>3</sup> kemunculan dan kehadiran organisasi keagamaan baru dianggap cukup fleksibel. Beberapa organisasi tersebut hadir dan berkontribusi merespons isu-isu keislaman, tak terkecuali di Madura. Kemunculan Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA), Aliansi Ulama Madura (AUMA), Forum Kiai Muda Madura (FKM), dan beberapa organisasi lain disinyalir bertujuan untuk merespons isu keumatan dan keislaman di Madura. BASSRA, misalnya, yang

<sup>1</sup> Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 120.

<sup>2</sup> Abd Hannan, “Fanatisme dan Stigma Sosial Pesantren Miftahul Ulum terhadap Kelompok Muhammadiyah di Pamekasan” (Tesis--Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2017), 164.

<sup>3</sup> Ketika Soeharto berkuasa pasca-pembantaian berdarah pada 1965, Soeharto melihat Islamisme menjadi salah satu sumber potensial radikalisme dan oposisi terhadap pemerintahannya. Ini adalah ancaman potensial yang signifikan, terutama mengingat Orde Baru benar-benar ingin menguatkan stabilitas kekuasaan sebagai fondasi eksistensi pemerintahannya. Sebagai antisipasi, rezim Orde Baru menghasilkan beberapa kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan ketidakstabilan politik; kebijakan yang dikategorikan oleh banyak Islamis sebagai anti-Islam. Islam politik sedang di-*framing* dan distigmatisasi agar Islam dianggap sebagai “musuh politik nomor dua” setelah komunisme. Rezim Soeharto ingin menempatkan Islamis sebagai aktor pinggiran dalam kehidupan politik Indonesia. Islamis sedang terpinggirkan dengan membatasi penggunaan simbol dan istilah Islam serta membatasi jumlah partai/organisasi Islam. Felix Heidux, “Between a Rock and a Hard Place: Radical Islam in Post-Suharto Indonesia”, *International Journal of Conflict and Violence*, Vol. 6, No. 1 (2012), 31.

kehadirannya tidak hanya mengawal pembangunan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) dan industrialisasi di Madura yang ditakutkan menggerus nilai-nilai religius dan moral masyarakat Madura, tetapi mereka mencoba membangun *ukhummah* antar-organisasi keislaman yang eksis di Madura.<sup>4</sup>

Agaknya kelahiran organisasi yang digawangi oleh para kiai menemukan momentumnya di mana era pasca-reformasi tidak ada kesulitan bagi mereka untuk berekspresi dan berkontribusi tidak hanya pada dimensi kulural via pesantren, tetapi membangun jaringan sosial politik mudah sekali dilakukan oleh para kiai. Sebagaimana beberapa riset yang dilakukan oleh Yanwar Pribadi<sup>5</sup> dan Elly Touwen-Bouwsma<sup>6</sup> yang menegaskan betapa kewibaan kiai tidak hanya terpatri dalam ranah agama saja, tetapi dalam ranah politik kewibawaan mereka dalam mengeluarkan “fatwa-fatwa” politik cukup dapat meyakinkan dan mendapatkan respons positif kalangan santri.

Tak terkecuali organisasi keagamaan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir terutama pasca dibangunnya jembatan Suramadu yang akhirnya melahirkan organisasi para kiai dalam wadah BASSRA. Eksistensi organisasi ini kemudian bermetamorfosis menjadi beberapa kelompok seperti Aliansi Ulama Madura (AUMA) dan Forum Kiai Muda Madura (FKM). Artikel ini secara khusus mengupas relasi para ulama yang tergabung dalam wadah AUMA yang merespons isu keislaman dan keumatan di wilayah Pamekasan. Menariknya, organisasi ini “bersemi” pasca mandeknya organisasi BASSRA dalam mengawal isu keumatan dan keislaman.

---

<sup>4</sup> Lihat Abdullah Sattar, “Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASSRA): Dakwah Multi Fungsi, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014), 222-223.

<sup>5</sup> Yanwar Pribadi, “Kiai in Madura: Their Roles in Local Politics in Indonesia”, *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 29, No. 3 (2012), 1-22; Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture”, *al-Jamiab: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No. 2 (2013), 1-32; Yanwar Pribadi, “Relasi Kiai, Masyarakat, dan Negara: Konfigurasi Politik Pemilu pada Masa Orde Baru di Madura”, *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2013), 183-201; Yanwar Pribadi, “Renegotiating Islam: The Kiai and People’s Resistance against the Government in the 1993 Nipah Dam Incident in Sampang, Madura”, *The 13th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, 2013; Yanwar Pribadi, “The Suramadu Bridge Affair: Un-bridging the State and the Kiai in New Order Madura”, *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 2 (2015).

<sup>6</sup> Elly Touwen-Bouwsma, “The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Administration,” dalam Mart Bax et.al (eds.), *Faith and Polity on Religion and Politics* (Amsterdam: VU University Press, 1992)

Usia AUMA memang tergolong sangat muda jika dibandingkan dengan organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Namun demikian, komposisi para alim tersohor yang menghiasai organisasi ini membuat namanya seolah sepadan dengan ormas keislaman yang sudah cukup populer di Pamekasan. Faktor paling dominan mengapa AUMA menjadi ormas kekinian berpengaruh di lingkungan masyarakat Pamekasan tidak lain ada pada kuatnya komitmen mereka memperjuangkan dakwah Islam yang *kaffah*; sebuah agenda menjalankan *amr ma'ruf naby munkar* secara kolektif dan sungguh-sungguh demi menegakkan jargon pembangunan Pamekasan yang benar-benar berasaskan keislaman.<sup>7</sup>

### Sejarah Aliansi Ulama Madura (AUMA) di Pamekasan

Gerakan Islamisme Aliansi Ulama Madura (AUMA)<sup>8</sup> merupakan perkumpulan ulama/kiai lokal Madura. Perkumpulan ini dideklarasikan di Pondok Pesantren Nurul Kholil Bangkalan Madura yang diasuh oleh KH. Zubair Muntashor, bertepatan pada tanggal Oktober 2015. Namun berdasarkan data lapangan, jauh hari sebelum tanggal tersebut, secara kepengurusan di tingkat pusat, AUMA sebenarnya sudah terbentuk sejak tanggal 21 Juli 2015 di PP Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan Madura. Menariknya, sekalipun AUMA diresmikan di Bangkalan, namun Kantor Pusat AUMA sendiri bertempat di Pamekasan di Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.<sup>9</sup> Hampir seluruh kabupaten mempunyai wakil

<sup>7</sup> Hal ini selaras dengan proyek Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) di Pamekasan yang dideklarasikan tahun 2002. Ulasan riset tentang Gerbang Salam dapat diamati dalam Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 15, No. 1 (2012).

<sup>8</sup> Komposisi kepengurusan AUMA secara umum terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Kecamatan. Pengrus pusat berkantor di JL. Raya Proppo, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Berlokasikan di PP. Ma'had Islami Salafi Darut Tauhid (MISDAT) di atas tanah *waqaf* dari alm. H. Muhammad Asy'ari Dauri, dan dana *waqaf* dari KH. Zubair Muntashor, yang murni dirikan untuk dakwah Islamiyah dan ilmu agama. Pengurus daerah: untuk daerah Bangkalan bertempat di PP. Mutaallimin II, di bawah pimpinan KH. Abdullah Khon Thobroni, Sabenah Bangkalan. Daerah Sampang berada bertempat di PP. Nurul Iman, dipimpin oleh KH. Ahmad Yahaya Syamsul Arifin, Sogiyen Omben Sampang. Wilayah Pamekasan berada di PP. Asy-Syaidul Kabir, dipimpin oleh KH. Mundzir Kholil, Sumber Batu Blumbungan Pamekasan. Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep, bertempat di PP. al-'Isaf, di bawah pimpinan KH. Jurjis Muzammil, Klaban Guluk-Guluk Sumenep.

<sup>9</sup> KH. Ali Karrar Shinhaji, *Wawancara*, Pamekasan 21 Juli 2016.

di jajaran pengurus utama AUMA. Tiap kabupaten di Madura juga mempunyai koordinator daerah. Adapun koordinator daerah Pamekasan dikomandoi oleh K.H. Nawawi Thoha, dan K.H Abd. Aziz Syahid sebagai sekretarisnya.

Berikut struktur pengurus Aliansi Ulama Madura (AUMA) periode 2016-2020.

Pembina:

1. KH. Muhammad Syamsul Arifin (Pamekasan)
  2. KH. Abd. Bastih Faqih (Pamekasan)
  3. KH. Taufiqurrahman, FM (Sumenep)
  4. KH. Fauzi Rasul (Sumenep)
  5. KH. Mahrus Abd. Malik (Sampang)
  6. KH. Muhaimin Abd. Bari (Sampang)
  7. KH. Muhammad Faishol Anwar (Bangkalan)
  8. KH. Zubair Muntashor (Bangkalan)
- Ketua Umum: KH. Ali Karrar Sinhaji (Pamekasan)

Ketua:

1. KH. Sholeh Abdur Rahman (Pamekasan)
  2. KH. Fahri Suyuti (Sumenep)
  3. KH. Buchori Ma'shum (Sampang)
  4. KH. Dr. HC. Dahlawie Zarkasyi (Bangkalan)
- Sekretaris Umum: KH. Drs. Fahdoli Moh. Ruham, M.Si  
Sekretaris: Ust. Ach. Waridi

Bendahara Umum: KH. Nurun Tajalla

Bendahara: KH. Muhammad Syafiuddin Hasibin

Pengawas:

1. Drs. KH. Abd. Ghaffar, M.HI. (Pamekasan)
2. KH. Mundzir Cholil (Pamekasan)
3. KH. Safradji (Sumenep)
4. KH. Ach. Fauzi Tijani (Sumenep)
5. KH. Yahya Hamiduddin (Sampang)
6. KH. Jakfar Shodiq (Sampang)
7. Kh. Abd. Adhim Kholili (Bangkalan)
8. KH. Abdullah Khon Thobroni (Bangkalan)

Adapun struktur kepengurusan AUMA Koorda Pamekasan Masa Bakti 2016-2020.

Pembina:

1. KH. Muhammad Syamsul Arifin
2. KH. Jazuli Jauhari
3. KH. Abd. Ghafur Syafiuddin

4. KH. Hasibin

5. KH. Mundzir Cholil

Ketua: KH. Nawawi Thoaha

Wakil Ketua: KH. Rosyad Imam

Sekretaris: KH. Abd. Aziz Syahid

Wakil Sekretaris: Ust. Waridi

Bendahara: KH. Musannan Mukhtar

Anggota aktif:

1. KH. Nurullaili Bahwi (Tlanakan)

2. KH. Waqit Abdullah (Plademawu)

3. KH. Dahlan Ma'shum Bahrawi (Galis)

4. KH. Mushoffan Ma'mun (Larangan)

5. KH. Hasbullah Fadholi (Kota)

6. KH. Imam Ramli (Proppo)

7. KH. Abdussattar (Palengan)

8. KH. Rowatib Hasibuddin (Pegantenan)

9. KH. Arif Madani (Pakong)

10. KH. Mukhtam (Batuampar)

11. KH. Mushleh (Pasean)

12. KH. Abd. Rozzaq (Waru)

13. KH. Fakrurrozi Musyaffa' (Kadur)

Anggota Pasif: Semua Ulama dan Tokoh Agama yang senafas dengan AUMA.

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan, kelahiran AUMA di Madura dilatari oleh perlunya wadah merespons isu-isu krusial keislaman, baik isu keislaman di level lokal maupun nasional. Secara umum, sekian faktor krusial tersebut dapat dikategorisasikan pada dua faktor, eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, kelahiran AUMA didorong oleh ragam persoalan keislaman yang saat itu menimpa berbagai penjuru Indonesia. Salah satu isu paling krusial adalah peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara, Papua. Pembakaran masjid ini menjadi pendorong utama lahirnya AUMA. Pada saat itu, para tokoh Islam yang tergabung dalam barisan ulama dan kiai-kiai Madura merasa risau dan gelisah atas apa yang menimpa masyarakat Muslim di Tolikara. Lebih-lebih banyak penganut Muslim di sana yang berasal dari daerah Madura, seperti Sampang dan Bangkalan.

Pada gilirannya, kegelisahan dan kerisauan tersebut kemudian mereka salurkan dalam wujud kegiatan keagamaan seperti istighasah dan doa bersama untuk keberadaan Muslim Tolikara, serta berharap supaya pemerintah saat itu adil mengambil sikap terkait peristiwa

Tolikara.<sup>10</sup> Kiai, ulama, dan para tokoh lintas organisasi Islam Madura berkumpul dalam kegiatan ini, baik yang memiliki latar keislaman NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam (SI), al-Irsyad, dan sebagainya. Semenjak pertemuan inilah muncul inisiatif mendirikan semacam perkumpulan atau asosiasi resmi, dengan tujuan sebagai wadah memperjuangkan masyarakat Muslim, khususnya ulama/kiai. Inisiasi perkumpulan atau asosiasi inilah yang kemudian melahirkan nama AUMA. Pada saat bersamaan, KH. Ali Karrar yang saat itu tercatat sebagai aktor intelektual di balik perkumpulan kiai/ulama lintas organisasi ini, kemudian secara aklamasi didaulat menjadi ketua AUMA. Berkenaan dengan ini, KH. Toha Amin, ketua AUMA Daerah Pamekasan menjelaskan:

“Berdirinya AUMA di sini sesungguhnya bersamaan dengan kasus pembakaran masjid di Tolikara di sana. Jadi Kiai Karrar di sini selaku ulama di Pamekasan mengadakan inisiatif mengadakan istighasah. Istighasah dan semacam berdoa kepada Allah supaya pemerintah bersikap adil. Di situ diundang oleh Kiai Karrar semua tokoh-tokoh masyarakat beserta ketua-ketua ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, SI, dan lain sebagainya. Di situ kemudian muncul keinginan untuk selalu berkumpul. Hanya di situ ada untuk mengadakan semacam asosiasi. *Ya*, kemudian jadilah asosiasi ini. Asosiasi ini adalah AUMA ini. Jadi AUMA di sini merupakan buah daripada keinginan masyarakat, khususnya ulama-ulama Pamekasan untuk menyikapi sikap pemerintah terhadap Tolikara”.<sup>11</sup>

Selain didorong oleh peristiwa gesekan keagamaan menyangkut pembakaran masjid Tolikara, hal lain yang melatari pendirian AUMA adalah mandeknya wadah perkumpulan ulama/kiai Madura yang tergabung dalam Organisasi Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA). Dari pengamatan penulis saat melakukan wawancara ke beberapa narasumber, beberapa kiai yang tergabung dalam BASSRA yang memutuskan henggang adalah kiai-kiai yang tidak lagi bisa menggunakan organisasi tersebut mengawal isu-isu terkini di Madura. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa, perkembangan organisasi BASSRA saat ini sudah tidak terlihat lagi pergerakannya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Kiai Karrar—selaku aktor intelektual berdirinya AUMA—berinisiatif

---

<sup>11</sup> KH. Nawawi Toha (Ketua AUMA Pamekasan), *Wawancara*, Pamekasan 6 Juni 2018.



membuat organisasi baru untuk menampung aspirasi para anggota yang lain. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat di lapangan, keputusan Kiai Karrar ini kemudian memunculkan pro-kontra di kalangan ulama/kiai *sepub* Madura. Sebagai daerah yang kental dengan sistem dan nilai hierarki, Kiai Karrar dianggap telah melangkahi ulama/kiai yang lebih senior, terutama ulama *sepub* berpengaruh Pamekasan, yakni Kiai Rofi'i al-Hamidi Banyuanyar Timur.

Visi dan misi AUMA selaku organisasi keagamaan sangat kental dengan aroma dakwah. Hal tersebut tergambar jelas dalam agenda utama mereka, di mana AUMA mempunyai semangat besar untuk memperjuangkan, memurnikan, memerangi, dan membersihkan segala bentuk penyimpangan keagamaan di kalangan masyarakat Madura. Berkenaan dengan ini, terdapat empat sasaran pokok yang menjadi target utama kerja AUMA, yakni paham Shī'ah, Wahhabi, Liberal, dan Penista Agama. Empat sasaran kerja ini mereka terjemahkan dalam akronim SYIBILIP (Shī'ah, Wahhabi, Liberal, dan Penista Agama). Bagi AUMA, empat usur ini merupakan paham keagamaan yang tidak saja salah, namun sudah melenceng dari ajaran Islam sebenarnya. Karenanya, pemberangusan dan peniadaan terhadap keempat paham ini adalah harga mati bagi AUMA. Dalam pandangan dan keyakinan mereka, bahaya dan efek buruk SYIBILIP bukan saja menyangkut aspek agama *an sich*. Lebih buruk dari itu, aliran dan perilaku SYIBILIP dapat menimbulkan disintegrasi di tengah masyarakat hingga berpotensi besar memecah belah NKRI.<sup>12</sup>

### **Eksistensi AUMA dan Perkembangan Gerakan Islam di Pamekasan**

Beberapa tahun belakangan ini, isu-isu keagamaan acap muncul menghiiasi wacana pemikiran Islam di Indonesia. Kontestasi antara kaum nasionalis-religius dengan kelompok religius-konservatif-islamistis dalam wacana politik di Indonesia,<sup>13</sup> penistaan agama oleh mantan

<sup>12</sup> KH Ali Karrar Shinhaji (Ketua AUMA), *Wawancara*, Pamekasan 22 Juni 2017.

<sup>13</sup> Kelompok nasionalis-religius cukup kental dengan kelompok yang pro-Jokowi, sedangkan kelompok yang pro-Prabowo banyak di antaranya yang nasionalis dan kelompok religius-konservatif-islamistis. Nuansa islamistis pada kubu Prabowo kentara jika melihat historis biografi Prabowo yang dikenal sebagai tentara yang agamis atau TNI Hijau. Ia dikenal sebagai tokoh TNI yang dekat dengan tokoh-tokoh Islam, seperti DDII. Sedangkan pasangan calon wakilnya dulu, Hatta Radjasa, merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) dari Palembang. Kelompok Islamistis pun semakin kental pada pilihan calon presiden 2019, di mana partai-partai yang mendukung Prabowo adalah partai Islam, seperti PAN, PKS, dan PBB. Lihat Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, dan Heni Ismiati, "Pembelahan

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (yang populer dipanggil Ahok),<sup>14</sup> kasus penyimpangan Ahmadiyah,<sup>15</sup> pengusiran Shi'ah di Sampang,<sup>16</sup> adalah sederet kasus yang cukup banyak direspons kalangan agamawan. Sikap pro dan kontra seputar respons terhadap wacana keislaman dan keumatan yang berkembang turut memberikan “panggung baru” bagi pemuka agama untuk eksis pada ranah publik.

Tidak terkecuali AUMA yang mencoba merespons dan memproduksi sikap-sikap keagamaan terkait dengan isu-isu lokal dan nasional yang berkembang di beberapa tahun belakang ini. Walaupun usia kelahirannya masih terbilang muda, namun eksistensi AUMA dalam merespons problem keagamaan sudah cukup sering terdengar. Misalnya upaya mereka merespons isu Sunni *vis a vis* Shi'ah,<sup>17</sup> pembentukan Madura sebagai provinsi,<sup>18</sup> isu pemimpin non-Muslim,<sup>19</sup> penistaan agama,<sup>20</sup> menolak paham sesat sebagaimana misi utamanya,<sup>21</sup> pelarangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender),<sup>22</sup> menolak standarisasi dan sertifikasi khatib,<sup>23</sup> dan lain sebagainya. Isu ini tidak lepas dari pantauan para kiai dalam organisasi AUMA. Komitmen mereka dalam mengawal Islam agar *kāffab* menjadi faktor utama mengapa organisasi ini menjadi sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat Pamekasan. Mereka

---

Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 1 (2017), 67.

<sup>14</sup> “Ulama NU Pamekasan Kecam Keras Sikap Ahok Terkait Persoalan Ini”, dalam [surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses](http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses) 8 Juni 2017; “Ulama NU Pamekasan Siapa Melawan Ahok”, dalam [surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses](http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses) 8 Juni 2017.

<sup>15</sup> “Kiai Se-Jawa Madura Desak Pembubaran Ahmadiyah” dalam [www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509/Diakses](http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509/Diakses) 5 April 2017.

<sup>16</sup> Ahmad Zainul Hamdi, “Klaim *Religious Authority* dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2 (2012).

<sup>17</sup> “Sunni Syiah: Politik Penyesatan dan Politik Kewargaan” dalam <http://liputanIslam.com/opini/Diakses> 27 Juni 2017.

<sup>18</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13858>

<sup>19</sup> “Tunjuk Pengacara: Aliansi Ulama Madura Akan Laporkan Ahok ke Polda Jatim” dalam <http://portalmadura.com/Diakses> 2 Mei 2018.

<sup>20</sup> “Ulama Se-Madura Laporkan Ahok ke Polda” dalam <http://beritaotomatis.blogspot.co.id/2016/10/Diakses> 27 Januari 2018.

<sup>21</sup> “Antisipasi Masuknya Paham Wahabi dan Syiah, AUMA Dideklarasikan”, dalam <http://maduranewsmedia.com/terkini/Diakses> 12 Februari 2018.

<sup>22</sup> “Ulama Madura: LGBT Ancam Keberlangsungan Peradaban Manusia”, dalam <http://news.okezone.com/read/2016/02/19/519/1316657/Diakses> 27 Juli 2017.

<sup>23</sup> <http://www.suaranews.co/2017/02/ulama-madura-kami-menolak-tegas.html>

menjalankan agenda utama mereka, yakni *amr ma'rūf naby munkar* secara kolektif dan sungguh-sungguh demi mengakkan jargon pembangunan Pamekasan yang benar-benar berasaskan keislaman. Berkaitan dengan upaya *amr ma'rūf naby munkar* di sini, informan menyebutkan:

“AUMA hanya membantu atau bergerak di bidang amar makruf nahi munkar secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi terhadap organisasi keislaman atau ormas Islam yang lain, ya kami ramu, kami rangkul semua, kami ajak semua untuk bersama-sama menjalankan *amr ma'rūf naby munkar*. Yang diprioritaskan adalah bidikan utama adalah SYIBILIP, Shi'ah Wahabi Liberal dan Penista agama. Itu bidikan *amr ma'rūf naby munkar* kami.”<sup>24</sup>

Mengacu pada pernyataan informan di atas, nampak jelas betapa AUMA memiliki kontribusi dan kedudukan penting dalam upaya keberlangsungan proyek islamisasi di Pamekasan. Hal yang menjadi kelebihan dan keunggulan AUMA adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan semua organisasi keislaman di Pamekasan, bahkan dengan ormas yang secara umur lebih tua darinya, baik dengan ormas keislaman yang memiliki pola keagamaan normatif, maupun ormas Islam yang cenderung dinamis. Karenanya, model kerja dakwah AUMA tidak bekerja sendirian (*one man one show*), namun melebur bersama kelompok lain di luar mereka. Kemampuan mereka merangkul ormas Islam dari lintas generasi dan lintas ‘bendera’ pada gilirannya membuat mereka mempunyai keleluasaan masuk ke ragam organisasi keislaman di luar mereka. Dalam kedudukan inilah AUMA berusaha menjalin sinergitas dengan harapan dapat memperkuat dan mempermudah agenda dakwah mereka di bumi Pamekasan.

Meski AUMA secara terang-terangan menegaskan bahwa mereka berupaya menjalin hubungan harmonis dengan kelompok Islam lainnya, kenyataan tersebut tidak kemudian menutupi fakta munculnya berbagai gesekan atau benturan dari ormas lain, terutama ormas yang dianggap tidak sepaham dengan prinsip Islam sesuai metode *al-salaf al-salih*, yakni sebuah cara pandang keislaman yang senantiasa mendasarkan pemikiran, sikap, tindakan, dan amaliah keagamaan pada prinsip-prinsip Islam normatif-tekstual. Bagi mereka, kebenaran dalam beragama adalah ketika pola dan perilaku keagamaan yang dianuti memuat keselarasan dengan metode berpikir yang telah diwariskan dan digariskan oleh para ulama terdahulu. Bagi mereka,

<sup>24</sup> KH. Nawawi Toha (Ketua AUMA Pamekasan), *Wawancara*, Pamekasan 6 Agustus 2018.

itulah Islam autentik. Dalam pandangan mereka, berbagai term-term keislaman yang muncul belakangan ini telah bercampur dengan pemikiran-pemikiran menyimpang, bahkan telah keluar dari Islam yang autentik.

KH. Umar Hamdan Karrar (Ketua FKM)—organisasi bentukan AUMA yang beranggotakan para gus/lora—dirinya menyebutkan bahwa sekalipun AUMA bersikap inklusif dengan ormas Islam lain, namun mereka tetap menjaga jarak. Terutama dengan ormas atau tokoh ulama tertentu yang pemahaman dan cara berpikir mereka (dianggap) tidak sejalan dengan metode *al-salaf al-salih*. Berdasarkan penuturan informan, ormas-ormas yang dimaksud adalah ormas yang di satu sisi memiliki pandangan menomorsatukan metode modern, namun pada sisi yang lain dalam praktiknya membelakangi garis ajaran *al-salaf al-salih*, seperti halnya Muhammadiyah. Pun demikian yang lebih parah dari itu, yakni ormas Islam yang cenderung memunculkan pemikiran membebaskan (liberatif), kemudian memunculkan term-term keislaman baru yang dalam pandangan mereka tidak saja menyimpang, namun lebih dari itu, liberal sebagaimana yang belakangan diperlihatkan oleh ormas Islam Nahdhatul Ulama (NU).

Berkenaan dengan ormas Islam NU—berdasarkan penuturan Umar Hamdan dan Imadul Haq Fadholi—bagi keduanya, NU hari ini bukan organisasi yang sejalan dengan cita-cita dan ideologi *the founding fathers*.<sup>25</sup> NU sekarang seolah telah kehilangan jati diri. Mereka tercerabut dari wajah autentiknya sebagai ormas keislaman sejati. Menurut keduanya, NU sudah tidak lagi berdiri kokoh sebagaimana *khittah* sebagai ormas keislaman. Hal ini nampak jelas dari sekian pemikiran keislaman kontemporer NU, yang dalam pandangan mereka sudah keluar dari garis-garis perjuangan NU, sebagaimana dicontohkan para pendirinya. Dalam anggapan Umar Hamdan, apa yang lakukan NU melalui tesis Islam nusantara—dalam batasan-batasan tertentu—adalah wujud nyata dari ketidakjelasan NU hari ini. Menurutnya, konsep pluralisme dan Islam nusantara sebagaimana yang diwacanakannya adalah konsep yang menyalahi prinsip dasar Islam. Ini adalah sikap keagamaan menyimpang yang tidak mengindahkan ajaran Islam ala *al-salaf al-salih*. Berkenaan dengan ini, Umar Hamdan menuturkan:

---

<sup>25</sup> KH. Umar Hamdan Karrar (Ketua FKM), *Wawancara*, Pamekasan 30 Juli 2017. KH Imadul Haq Fadholi (Sekretaris FKM), *Wawancara*, Pamekasan 6 November 2016.

“Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kami sampai saat ini agak menjauh dari organisasi seperti NU, karena ada hal-hal yang menjadikan jarak antara kami dengan mereka, khususnya juga dalam pemikiran yang bisa dikatakan modern. Pemikiran NU yang bisa dikatakan modern, seperti adanya istilah Islam nusantara. Ada hal-hal yang itu menjadikan jarak antara kami dengan NU ...”<sup>26</sup>

AUMA memiliki akar keislaman yang bertumpu pada hasil pemikiran ulama terdahulu, yaitu sikap untuk senantiasa menjunjung tinggi sikap *taqlid*.<sup>27</sup> Taat dan patuh totalitas kepada ajaran generasi salaf terutama menyangkut aspek *shar‘i*, *fiqh*, dan *‘ubudiyah*. Sikap AUMA yang lebih memilih untuk *taqlid* di sini berseberangan jauh dengan tradisi *talfiq* keislaman Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih mengedepankan sikap modern dalam beragama, yakni berusaha menyejajarkan teks-teks keagamaan dengan perkembangan zaman. Semangat Islam modernis inilah yang membuat banyak kalangan menyebut Muhammadiyah sebagai Islam modernisnya Indonesia.<sup>28</sup>

Berangkat dari fakta di atas, nampak jelas di mana posisi tradisi keislaman AUMA berada. Semangat besar dan komitmen kuat mereka untuk senantiasa berpijak pada pemikiran dan metode Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah yang berakar pada metode *al-salaf al-sālih* mengisyaratkan atas wujud tipologi keislaman ganda, tidak saja berwajah normatif namun juga tradisionalis. Term Islam tradisionalis—sebagaimana merujuk pada penjelasan M. Amin Abdullah—adalah Islam yang berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab suci, di mana sampai pada batas-batas tertentu adalah bercorak literalis, tekstual, dan skriptualis.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Abuddin Nata (2001), Islam normatif diartikan sebagai tradisi keislaman yang berpusat pada wahyu yang berasal dari tuhan. Sebagai wahyu, maka wajibnya hukumnya diyakini, diterima sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu gugat.<sup>30</sup> Berdasarkan dua defnisi ini, Islam normatif secara holistik memiliki karakteristik keislaman yang identik dengan konstruksi paham keagamaan yang doktrinal-teologis. Di sisi yang berbeda paham keagamaan mereka seringkali

<sup>26</sup> KH. Umar Hamdan Karrar (Ketua FKM), *Wawancara*, Pamekasan 30 Juli 2017.

<sup>27</sup> KH. Ali Karrar (Ketua AUMA), *Wawancara*, Pamekasan 1 Agustus 2017.

<sup>28</sup> Syekh Idahram, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 302.

<sup>29</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), vi.

<sup>30</sup> Nata, *Peta Keragaman Pemikiran*, 29.

menunjukkan penegasian terhadap instrumen keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik melalui pendekatan historis, sosiologis, filosofis, maupun antropologis. Karakter ini memuat kesamaan dengan apa yang ditunjukkan AUMA selama ini, di mana mereka mengusung antitesis pemikiran keagamaan yang moderat dan liberal. Term-term keislaman kontemporer, seperti halnya pluralisme, Islam nusantara, dan toleransi antaragama, dalam pandangan mereka adalah kesalahan dalam beragama. Diturunkan oleh Imadul Haq Fadholi, bahwa “semakin moderatnya para tokoh NU dalam merespons isu keumatan, semakin kuat pula penolakan para kiai di Pamekasan terhadap pemikiran tersebut”.<sup>31</sup>

Selain memiliki ciri keislaman normatif, berdasarkan sekian fakta penelitian di atas, dapat disimpulkan pula bahwa tradisi keislaman AUMA juga dekat dengan ciri Islam tradisional. Tradisionalis merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti mengandung makna adat: kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Dalam pengertian yang khusus, Abuddin Nata menyebutkan bahwa Islam tradisional adalah pola keislaman yang berpegang teguh pada nilai dan ajaran Islam terdahulu, tidak saja pada al-Qur’ān dan Ḥadīth, namun juga pada produk-produk pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fiqh, tafsir, tauhid dan sebagainya.<sup>32</sup> Dengan sikapnya yang demikian, mereka yang tergabung dalam Islam tradisional seringkali mengalami kekaburan pandangan dalam menentukan dan membedakan antara teks yang murni kalam ilahi dan ḥadīth, dan teks yang sesungguhnya merupakan hasil penalaran atau pemikiran. Konsekuensinya, dua teks berbeda ini senantiasa didudukkan sebagai kebenaran mutlak, sehingga bersikap kritis—lebih-lebih menolak pada kedua teks tersebut—akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap ajaran Islam. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa kelompok Islam tradisional, termasuk AUMA, memiliki kecenderungan militan atau bahkan ‘radikal’ dalam mengambil keputusan. Sikap militansi beragama ini mereka perlihatkan melalui penegasan, bahwa hal berkaitan dengan agama adalah harga mati.

---

<sup>31</sup> KH Imadul Haq Fadholi (Sekretaris FKM), *Wawancara*, Pamekasan 6 November 2016.

<sup>32</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 139.

Untuk mendukung tesis di atas, dalam konstruksi penulis, sekurang-kurangnya ada beberapa fakta yang bisa jadi penguat tesis Islam tradisional ormas AUMA.

*Pertama*, secara teoretis Islam tradisional memiliki ciri eksklusif. Kelompok Islam tradisional cenderung menutup diri, baik dalam hal pemikiran, sikap, maupun tindakan. Dalam konteks AUMA, eksklusivitas di sini nampak jelas dari sikap mereka yang sama sekali tidak mau berdamai dengan paham yang bertentangan dengan mereka. Khususnya paham yang tergabung dalam SYIBILIP, yakni Shī'ah, Wahabi, Liberalisme, dan Penista Agama.

*Kedua*, ketakmampuan mereka dalam memdeakan antara yang ajaran dan non-ajaran. Di sini kelompok Islam tradisional mempunyai penilaian bahwa semua hal yang berkenaan dengan ajaran agama adalah mutlak kebenarannya. Tidak ada lagi proses dialektika pemikiran untuk mendialogkan kembali teks-teks keagamaan dengan realitas perkembangan zaman. Pendirian AUMA yang menyebut metode *al-salaf al-sālih* sebagai instrumen tunggal keislaman adalah bentuk ketakmampuan mereka untuk membedakan antara mana yang ajaran normatif dan mana ajaran yang historis.

*Ketiga*, cara berpikir yang berorientasi ke belakang. Bagi kelompok Islam tradisional berbagai ajaran dan nilai Islam yang telah diproduksi ulama terdahulu adalah wujud paten dan final yang harus diikuti. Dalam konteks keberislaman AUMA, sikap keagamaan seperti ini mereka representasikan dalam bentuk sikap *taqlid*, sebagaimana ditekankan oleh informan kunci di atas.

*Keempat*, cenderung mengutamakan perasaan daripada pemikiran. Ciri ini mengisyaratkan bahwa kelompok Islam tradisional tidak memiliki kebiasaan untuk menanamkan sikap kritis dalam beragama. Konsekuensinya, setiap term-term keagamaan yang diproduksi melalui hasil pemikiran dianggap sebagai penyimpangan. Pandangan AUMA yang menyebut term Islam nusantara sebagai ketidakbenaran adalah contoh kecil dari ciri ini.

*Kelima*, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ciri ini mengandaikan bahwa kelompok Islam tradisional kental dengan aktivitas sosial yang berbau pemikiran-pemikiran terdahulu, baik itu dalam sektor pendidikan maupun ekonomi, dan sebagainya.

Untuk menguatkan data dan fakta di lapangan, pemikiran ini terlihat dalam sistem pendidikan yang terdapat di Pesantren MISDAT, pesantren yang diasuh atau dipimpin oleh Kiai Ali Karrar Shinhaji.

Pesantren tersebut tidak menerapkan jenjang pendidikan formal, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan selain sejenisnya. Semua proses pendidikan, mulai dari sistem dan strukturnya, difokuskan pada pendidikan *diniyah*/keagamaan yang berpusat pada kajian kitab kuning. Menariknya semua proses pendidikan di sana masih berlangsung dalam metode dan cara yang sangat tradisional, yakni sistem *sorogan*.

*Keenam*, ciri terakhir dari ormas Islam tradisional adalah jumud dan statis, bahwa ada kecenderungan untuk tidak mau mengikuti perubahan dan mempertahankan apa-apa yang dalam pandangan mereka baik. Sejalan dengan ciri ini, AUMA sendiri selama ini bersikap resisten terhadap segala bentuk pembaruan, terutama menyakut pemikiran keislaman. Atas dasar pemikiran inilah, hingga saat ini FKM sebagai ormas turunan yang lahir dari rahim AUMA, tidak dapat menjalin dengan ormas-ormas berbau modernis, seperti halnya kelompok Islam Muhammadiyah. Pun demikian dengan ormas Islam NU yang belakangan menurut mereka sudah tertular paham-paham kekinian yang cenderung liberal.

### **Pola Gerakan AUMA: dari Persuasif hingga Preventif**

Sasaran utama dakwah AUMA adalah memberangus paham-paham keislaman yang menurut mereka melenceng dari nilai ajaran Islam. Ragam paham yang melenceng tersebut adalah paham keislaman yang bermuatan ajaran Shi'ah, Wahabi, liberal, dan penistaan terhadap agama. Menurut AUMA, keempat paham tersebut hukumnya "haram" eksis ada di Pamekasan. Jika ada gejala-gejala keagamaan yang mengarah ke sana, AUMA setegas mungkin akan merespons secara persuasif dalam bentuk peringatan, atau dengan represif dan preventif berupa penutupan paksa hingga aksi penggeladahan.

Secara tekstual, upaya persuasif lazim dikenal sebagai usaha mempengaruhi dengan menggunakan cara atau pendekatan yang halus. Sifatnya lebih pada membujuk, menasihati, dan mengarahkan dengan cara elegan.<sup>33</sup> Dalam konteks berdakwah, upaya persuasif yang dilakukan AUMA mengisyaratkan pada usaha penguatan keislaman di Pamekasan melalui ajakan dan seruan keagamaan yang halus. Tidak ada tindakan-tindakan fisik yang cenderung megarah pada perilaku dan tindak kekerasan. Cara ini lebih pada upaya musyawarah, menasihati, dan memberi peringatan. Dengan demikian, sekalipun

---

<sup>33</sup> Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 403.



dalam visi dan misinya AUMA mencanangkan penghapusan segala bentuk deviasi dalam beragama, bukan kemudian mereka langsung berperilaku kasar dan keras ketika mendapati suatu kasus yang mengarah ke sana. Cara-cara demikian seringkali AUMA lakukan ketika mendapati suatu kasus di Pamekasan, seperti halnya pengedaran dan penjualan minuman keras yang ditemui di banyak tempat karaoke Pamekasan, kemudian tempat transaksi perempuan komersial di Desa Ponteh, Kecamatan Larangan.

Menurut AUMA, sekalipun visi-misi kelahiran mereka bertujuan melindungi keberadaan agama beserta segala nilai ajarannya secara absolut, tidak kemudian membuat mereka bertindak secara sepihak. Sebaliknya, mereka senantiasa menyelaraskan aksi dan tindakan mereka dengan prosedur atau hukum yang berlaku. Sebab itu, hal pertama mereka lakukan ketika mendapati suatu bentuk penyimpangan (nilai) keagamaan di tengah masyarakat adalah melakukan rapat internal dan melibatkan tokoh-tokoh kiai yang tergabung dalam kepengurusan. Pada tahap ini, mereka membicarakan seluruh problematika yang terdapat di suatu daerah, setelah itu mereka berpikir dan menyepakati bersama bagaimana memberikan solusi atau penanganannya. Tidak lupa pula AUMA mendatangi pihak-pihak berwajib, seperti aparat kepolisian untuk melaporkan kepada mereka supaya secepat mungkin bertindak. Berkenaan dengan ini, Umar Hamdan menyampaikan:

“Kami usahakan perjuangan kita selalu bersinergi dengan pemerintah atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apapun yang menjadi tindakan kami, kami usahakan agar upaya ini tidak berseberangan dengan pemerintah. Jadi yang terjadi di Pamekasan, baik itu upaya kita menolak prostitusi ataupun lain lainnya, pada dasarnya kami sudah mengetahui seluk-beluknya, namun kami tetap turun ke lapangan menolak hal itu. Kami berkomitmen agar tindakan kami upaya kami tidak berseberangan dengan pihak pemerintah setempat. *Yab* seperti itu...”<sup>34</sup>

Adapun cara preventif atau represif lazimnya mereka lakukan ketika sebelumnya sudah diupayakan cara-cara persuasif, namun dalam prosesnya tidak ada tanggapan dari kelompok yang menjadi objek operasi mereka. Prosedur preventif ini, bagi organisasi AUMA, menjadi solusi atau jalan terakhir ketika pihak terkait tidak mengindahkan arahan para kiai yang disampaikan kepada mereka.

<sup>34</sup> KH. Umar Hamdan Karrar (Ketua FKM), *Wawancara*, Pamekasan 30 Juli 2017.

Bagi ormas AUMA, karena hal itu menyangkut pada penanaman dan pengaplikasian nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan menyangkut *amr ma'ruf naby munkar*, maka hal demikian adalah harga mati untuk ditegakkan. Karenanya, dalam banyak kasus sosial keagamaan di Pamekasan, tidak segan-segan AUMA mengambil tindakan tegas, bahkan hingga benturan fisik. Mereka bisa melakukan penggeledahan, bahkan menutup paksa setiap lokasi yang oleh mereka dianggap menjadi tempat berlangsungnya praktik-praktik kemaksiatan dan kemunkaran yang menimbulkan penyakit di tengah masyarakat. Tindakan inilah yang mereka ambil ketika menutup paksa tempat-tempat karaoke, seperti Wira Raja, yang dicurigai menjadi tempat mesum dan transaksi seks komersial. Penutupan lokalisasi seks komersial di Desa Ponteh Pamekasan yang berujung pada aksi bentrok dengan warga sekitar lokalisasi.

Terkait dengan tindakan represif ini, berdasarkan observasi dan penggalian data lapangan yang dilakukan peneliti, didapati fakta bahwa jauh hari sebelum AUMA resmi didirikan, KH. Ali Karrar, selaku pimpinan aktif Pondok Pesantren MISDAT, sudah terlibat aktif dalam banyak kegiatan dakwah, terutama berkenaan dengan isu paham keislaman yang berhubungan dengan proses penyebaran Shī'ah, Wahabi, liberalisme, dan praktik penistaan agama. Menurut penuturan Ulul 'Azmi—santri kepercayaan keluarga pimpinan pesantren MISDAT—diceritakan bahwa pada masa tragedi Shī'ah Sampang (2012),<sup>35</sup> Kiai Karrar beserta komunitas pesantren MISDAT, dalam hal ini santri dan pengurus, turut terlibat aktif dalam aksi yang berujung pada pembakaran dan pengusiran kelompok Shī'ah Sampang. Hal menarik dari peristiwa ini, Kiai Tajul Muluk, selaku pimpinan kelompok Shī'ah Sampang, merupakan sosok kiai yang tercatat pernah *nyantri* di pesantren MISDAT. Namun setelah Kiai Karrar mengetahui bahwa Kiai Tajul Muluk telah terjangkiti paham Shī'ah, Kiai Karrar kemudian menjadi murka, hingga akhirnya menyebutnya sebagai seorang yang sesat.

Sampai saat ini, keberadaan seluruh elemen Pesantren MISDAT, terlebih semenjak lahirnya gerakan islamisme AUMA sebagai wadah resmi pergerakan, tetap aktif melibatkan diri mengawal dan menjaga

---

<sup>35</sup> Tragedi ini terjadi pada Ahad, 26 Agustus 2012. Konflik paham keagamaan yang terjadi sejak 2004 ini, berujung pada aksi pembakaran 37 rumah pengikut Shī'ah, pelemparan batu, dan perkelahian hingga mengakibatkan satu korban tewas dan belasan luka-luka. Hingga sekarang masyarakat penganut Shī'ah Sampang mengungsi di Sidoarjo dan mereka tidak diperbolehkan kembali ke tempat asal mereka sebelum memastikan diri keluar dari ajaran atau paham Shī'ah.

dinamika Islam yang autentik di Pamekasan. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, saat ini elemen komunitas Pesantren MISDAT di bawah koordinasi AUMA sedang mempersiapkan aksi lanjutan menyikapi isu akan kembali beroperasinya salah satu hotel di Tlanakan Pamekasan. Keberadaan hotel tersebut—menurut penelusuran penulis—saat ini masih belum beroperasi semenjak muncul aksi penolakan dari berbagai ormas Islam di Pamekasan pada tahun 2011 lalu.<sup>36</sup>

### **Formalisasi Syariat hingga Purifikasi Pemikiran Keislaman ala Aliansi Ulama Madura**

Di beberapa tahun belakangan ini Pamekasan dianggap sebagai salah satu daerah yang ingin mengoptimalkan penerapan syariah pada segenap dimensi kehidupan. Dimensi religiositas ini tercermin dengan jelas pada visi dan cita-cita pembangunan daerah setempat. Pamekasan mempunyai cita-cita pembangunan dan pengembangan daerah berbasis nilai-nilai keislaman. Ide merealisasikan daerah dengan nuansa keislaman tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah jargon pembangunan daerah berbunyi, *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami*, atau yang populer dengan sebutan Gerbang Salam.<sup>37</sup> Melalui jargon ini, ada semangat, harapan, dan cita-cita besar pemerintah untuk menjadikan nilai-nilai keislaman (shari‘ah) sebagai *road map* pembangunan Pamekasan ke depan.

Secara genealogis, gerakan pembangunan Pamekasan bernuansa islami sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2002. Ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002, Tanggal 30 April 2002.<sup>38</sup> Walaupun jauh sebelum keputusan tersebut, upaya politis menjadikan Pamekasan bernuansakan syariah Islam sesungguhnya telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya, tepatnya sejak terbentuknya pusat kajian bernama LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) pada tahun 1999, yang kedudukannya berada langsung di bawah naungan pemerintah

<sup>36</sup> “Ulama dan Warga Segel Hotel Bintang” (27/ 4/2011), <https://www.liputan6.com/news/read/331680/ulama-dan-warga-segel-hotel-bintang>, diakses pada 24 Agustus 2018.

<sup>37</sup> Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah: Tinjauan Elemen Masyarakat”, *al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, Vol. 16 (2006), 231.

<sup>38</sup> Hendri Masduki, “Perspektif Sosiologis Konsep Kebijakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) di Kabupaten Pamekasan: Jawaban terhadap Wacana Pemisahan Agama dengan Politik”, *Jurnal El-Furqonia*, Vol. 05, No. 02 (2017), 152.

daerah.<sup>39</sup> Upaya islamisasi Pamekasan secara umum terekam dalam perundang-undangan berikut, yakni (1) Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol: (2) Surat Edaran Bupati nomor 450 tahun 2002 tentang keharusan memakai jilbab bagi karyawan pemerintah, menutup kegiatan perniagaan sewaktu azan berkumandang, penambahan jam pelajaran agama Islam, dan keharusan memakai baju koko dan kopiah setiap hari Jumat bagi karyawan: (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran: (4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendidikan Agama.<sup>40</sup> Puncaknya adalah terbitnya Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Gerbang Salam sebagai Model dan Strategi Dakwah di Kabupaten Pamekasan.

Dalam rangka menyebarluaskan, menjaga, dan menguatkan prinsip dasar ajaran Islam, AUMA hadir menopang propaganda syariatisasi tersebut. Karena ideologi yang tertuang dalam Gerbang Salam dan visi dakwah AUMA selaras, maka upaya yang dilakukan oleh AUMA dipandang sebagai penyempurna dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti di antara umara dan ulama yang ada di Pamekasan, ada wujud kesepahaman pada upaya menjadikan Pamekasan kota berbasis syariat Islam. Di sisi yang berbeda, syariat Islam yang coba diterapkan dan diideologikan oleh pemerintah diarahkan pada satu *mainstream* keislaman, yakni mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Maka, setiap wacana keislaman di daerah tersebut yang terindikasi Shī'ah, Wahabi, Liberalisme, dan menistakan agama Islam, maka dengan sekuat tenaga organisasi AUMA akan menolaknya.

Berkenaan dengan keberadaan Shī'ah di Madura, peneliti mendapati fakta menarik perihal relasi AUMA dan kelompok Shī'ah. Berdasarkan dinamika paham keislaman di Madura, khususnya di lingkungan masyarakat Pamekasan, nampak jelas betapa organisasi ini bersikap resisten terhadap kelompok Shī'ah daripada kelompok paham lain di luar dirinya. Sikap demikian tidak lepas dari anggapan mereka yang menilai paham Shī'ah menyimpan potensi bahaya lebih besar daripada lainnya, misalnya kelompok Wahabi. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun peneliti, sekurangnya ada tiga alasan besar

---

<sup>39</sup> Tim Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan, *Buku Saku Gerbang Salam: Mengenal Gerbang Salam* (Pamekasan: LP2SI Pamekasan, 2011), 3.

<sup>40</sup> Ibid., 4.

mengapa AUMA begitu antipati terhadap paham Shī'ah. *Pertama*, dalam pandangan AUMA, Shī'ah dikenal sebagai paham keislaman yang tidak saja menyimpang, namun juga memuat doktrin keagamaan yang secara terang-terang berseberangan dengan ajaran Islam kelompok Sunnī; sebuah paham mayoritas yang menjadi panutan dari ormas Islam di Indonesia, termasuk AUMA. Salah satu bentuk doktrin mereka yang tidak dapat diterima adalah ajaran tentang *tahrif* al-Qur'ān. Bahwa dalam keyakinan penganut Shī'ah, al-Qur'ān yang ada saat ini merupakan kitab suci palsu dan sudah mengalami banyak perubahan dan pengurangan dari wujud dan susunan aslinya. *Kedua*, sebagaimana telah ditetapkan oleh fatwa MUI Provinsi Jatim, status hukum Shī'ah secara jelas dan tegas telah dihukumi sesat dan menyimpang. Hal ini termuat jelas dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, no.kep-01/SKF-MUI/JTM/1/2012. Dengan demikian keberadaannya tidak mempunyai aspek legalitas untuk dapat diajarkan kepada segenap lapisan masyarakat. Berkenaan dengan aspek hukum positif penyimpangan Shī'ah ini, organisasi AUMA menilai kekuatan hukum ini masih relatif lemah, karena belum ada kejelasan sikap dari MUI pusat. Untuk itu AUMA berkomitmen untuk tetap terus mengawal dan mengupayakan semaksimal mungkin agar MUI pusat secepatnya mengeluarkan fatwa kesesatan Shī'ah. Dengan demikian, AUMA memiliki keleluasaan dan kekuatan hukum pasti mengontrol dan menolak keberadaan Shī'ah di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat Madura. Berkenaan dengan ini, informan menyebutkan:

“..Secara konstitusional kita berusaha supaya empat, tiga, yang... dua aliran ini supaya dilarang. Secara konstitusional, kita tengah memperjuangkan supaya keluarnya fatwa sesat Shī'ah dari MUI pusat. Untuk Jawa Timur sudah keluar. Sekarang mengusahakan supaya mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat Shī'ah. Terakhir bertemu dengan MUI berapa bulan yang lalu..”<sup>41</sup>

Satu rupa dengan Shī'ah, paham Wahabi juga merupakan paham keislaman yang tegas ditolak oleh AUMA. Dalam pandangan mereka, paham ini bukan saja sesat, namun juga merupakan musuh Islam yang harus dilawan dan harus dihabisi eksistensi dan penyebarannya dari wajah keislaman di Indonesia, khususnya Madura. Dalam pandangan mereka, hal paling tidak bisa diterima dari kelompok ini adalah sikap mereka yang mudah mengafirkan kelompok lain. Kesalahan paling

<sup>41</sup> KH. Umar Hamdan Karrar (Ketua FKM), *Wawancara*, Pamekasan 30 Juli 2017.

mendasar dari kelompok ini adalah ketika mereka memiliki penilaian menyalahkan ritual keagamaan kelompok Islam lainnya, baik ritual NU dan SI yang beberapa ritualnya berakar dari kebiasaan, adat, atau tradisi masyarakat.

Ketika dikonfirmasi perihal sikap keagamaan para kiai di organisasi AUMA terhadap kelompok Wahabi, mereka menegaskan cukup terbuka dan menerimanya eksis di Pamekasan. Artinya, ketegasan mereka dalam merespons paham Wahabi di Pamekasan tidak seperti ketika mereka berhadapan dengan kelompok Shī'ah yang cenderung frontal. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, organisasi ini sangat lunak dan memberi ruang berekspresi kelompok Wahabi untuk menjalankan rutinitas keagamaannya selama kegiatan dilakukan pada basis kelompok mereka dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum.<sup>42</sup> Berdasarkan pengakuan informan, sejauh ini pusat kegiatan keagamaan Wahabi dibatasi di Masjid Ridwan, Kecamatan Kota Pamekasan. Dalam perkembangan selanjutnya, sikap AUMA yang cenderung elastis terhadap eksistensi Wahabi di Pamekasan mengundang pro-kontra di kalangan lintas ormas keislaman Pamekasan. Tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan komitmen dan kesungguhan AUMA dalam memberantas penyebaran Wahabi di Pamekasan. Berdasarkan penuturan Ahnu Idris, pimpinan Gerakan Santri dan Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (GESPER), pada saat dirinya bersama pimpinan ormas Islam lain melakukan aksi penolakan atas kedatangan tokoh Wahabi, Ust. Basalamah, yang saat itu dijadwalkan mengisi pengajian di salah satu masjid Pamekasan, organisasi AUMA diketahui tidak ambil bagian dalam aksi tersebut.<sup>43</sup>

Bagi AUMA, sikap mereka yang terkesan 'membiarkan' aktivitas keagamaan kelompok Wahabi Pamekasan sesungguhnya bukan wujud sikap yang kemudian bisa disimpulkan sebagai melunak. Dalam garis perjuangan AUMA, baik Wahabi dan Shī'ah adalah sekte menyimpang. Oleh karenanya, kedua paham tersebut adalah musuh besar yang sama-sama mereka tolak, baik dalam hal ajaran maupun praktik. Namun demikian, walaupun kemudian AUMA masih belum dapat bertindak tegas terhadap salah satunya, kelompok Wahabi misal, itu murni karena alasan kejelasan hukum. Karena secara hukum

---

<sup>42</sup> KH Imadul Haq Fadholi (Sekretaris FKM), *Wawancara*, Pamekasan 6 November 2016.

<sup>43</sup> Ahnu Idris (Ketua Ormas Gerakan Santri dan Pelajar Rahmatan Lil'alamin (GESPER), *Wawancara*, Pamekasan 17 Agustus 2016.

positif, hingga sekarang AUMA tidak memiliki payung hukum jelas untuk bertindak lebih. Sejauh ini belum adalah kepastian hukum yang menyebutkan bahwa Wahabi adalah kelompok atau paham sesat. Menurut mereka, ketidakjelasan hukum inilah yang mendasari perlakuan ‘terbuka’ mereka terhadap masyarakat penganut Wahabi Pamekasan. Berkaitan dengan masalah kepastian hukum paham Wahabi ini, AUMA berusaha keras lahirnya perundangan yang menyatakan kesesatan Wahabi. Sehingga nantinya mereka sendiri akan memiliki landasan normatif yang kuat untuk menindak dan merespons keberadaan Wahabi, beserta segala jenis kegiatan keagamaan mereka yang selama ini dijalankan di Pamekasan.<sup>44</sup>

Agenda dakwah AUMA dalam upaya membendung dan menghentikan penyebaran SYIBILIP selama ini dijalankan melalui dua pendekatan, teoretis dan praktis. Pendekatan dakwah secara teoretis pada dasarnya mengandaikan pada setiap kegiatan keagamaan AUMA yang dilakukan melalui aktivitas pendidikan dan keilmuan. Dalam aspek pendidikan, organisasi ini berupaya melakukan penyadaran, pencerahan, dan pembelajaran pada masyarakat mengenai berbagai pemahaman dan ajaran keagamaan yang tidak sejalan dengan prinsip Islam yang sesungguhnya. Terutama ajaran kesilaman yang bersumber, atau bahkan memuat unsur SYIBILIP. Untuk memastikan keberlangsungan dakwah melalui jalur pendidikan di sini, AUMA memanfaatkan keberadaan pesantren. Dalam kaitan ini, setiap anggota AUMA yang berkedudukan sebagai pimpinan pesantren, dituntut berperan aktif menggerakkan fungsi kepesantrenan. Melakukan kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah/madrasah, pembimbingan masyarakat melalui aktivitas pengajian yang berorientasi pada penguatan akidah atau paham keislaman Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Berkenaan dengan kegiatan ini, informan menyebutkan:

“Kami hanya forum *ya*. Jadi forum itu hanya di kalangan para ulama kita rangkul. Kita melakukan musyawarah kalau ada gejala di suatu daerah, itu kita melakukan upayanya. Tetapi untuk tindakan-tindakan seperti semacam pendidikan dalam arti oleh AUMA itu belum, karena kami kan semua orang pesantren, jadi cukup pesantren masing-masing yang melakukan seminar *ya* pendidikan atau kursus-kursus atau pembinaan pelatihan-

<sup>44</sup> Kesimpulan dari hasil wawancara dengan KH Ali Karrar Shinhaji, Pamekasan 22 Juni 2017.

pelatihan itu cukup pesantren-pesantren dari anggota AUMA...”<sup>45</sup>

Untuk memaksimalkan jalan dakwah mereka melalui jalur pendidikan pesantren, AUMA menerbitkan kitab/buku pembelajaran khusus. Buku tersebut ditulis langsung oleh AUMA, di mana di dalamnya memuat sekian banyak penjelasan dan dalil keagamaan yang selama ini menjadi amalan dan ritualitas keagamaan mereka. Selain itu, ada juga berbagai penjelasan ritualitas keagamaan yang seringkali mengundang perdebatan di tengah kelompok dan ormas Islam tertentu, seperti halnya kegiatan *tablilan*, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Bagian paling urgen dan substansial di dalamnya adalah penjelasan AUMA mengenai ragam penyimpangan dan kesesatan kelompok atau paham tertentu yang selama ini menjadi bidikan AUMA, seperti paham Shī'ah, Liberalisme, Wahabi, dan Penista Agama. Beberapa buku/kita yang sejauh telah berhasil mereka susun adalah: *Pancaran Kumala di Sekitar Perayaan Peringatan Mauled Nabi al-Musthofa* (2016), *Petir Menyambar Kepala Orang-orang Yang Mengkafirkan Ayah Bunda Nabi al-Mukhtar* (t.th), *Sinar Bulan di dalam Pelaksanaan Tablilan* (2016).

Selain melalui jalur pendidikan, strategi dakwah AUMA juga bergerak melalui pendekatan yang sifatnya praktis. Berdasarkan pembacaan peneliti melalui data lapangan, pendekatan ini umumnya bergerak dalam dua pola, yaitu pola birokrasi dan pola kemasyarakatan. Pola dakwah jalur birokrasi merujuk pada perjuangan AUMA untuk mengoptimalkan nilai dan ajaran keislaman melalui penguatan posisi diri di sektor pemerintahan. Upaya birokratis di sini mencakup tiga aspek, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada ranah legislatif, AUMA berupaya mendorong jajaran dewan daerah Pamekasan memproduksi perundangan-perundangan daerah yang memuat unsur-unsur keislaman. Sebaliknya, mereka akan senantiasa bersikap resisten terhadap perundangan daerah yang menurut mereka berpotensi mendatangkan penyakit atau kerusakan moral di tengah masyarakat, terlebih jika hal itu bertentangan dengan norma dan nilai keislaman. Upaya-upaya inilah yang saat ini perjuangankan AUMA perihal perundangan daerah menyangkut perizinan karaoke di Pamekasan, di mana organisasi ini berusaha sekuat mungkin supaya peraturan daerah berkaitan dengan karaoke lebih diperketat. Mengingat selama ini banyak lokasi hiburan karaoke

---

<sup>45</sup> Ibid.



setempat yang dalam praktiknya dipenuhi hiburan-hiburan malam dan praktik kemaksiatan.

Selain sektor legislatif, pergerakan AUMA dalam menguatkan keislaman di Pamekasan juga dijalankan melalui jalur eksekutif. Untuk pendekatan ini, AUMA berupaya menjalin komunikasi dan sinergitas bersama seluruh kepala ke pemerintahan daerah, yakni bupati dan wakil bupati, tidak saja di daerah Pamekasan, namun juga ke seluruh pimpinan daerah Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan sendiri. Untuk menjaga sinergitas tersebut, AUMA acap kali mengadakan kegiatan bersama. Salah satunya adalah menjalin silaturahmi antara AUMA-FKM dengan kepala daerah empat kabupaten Madura, yang rutin dilaksanakan tiap tahun. Lazimnya kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari-hari besar Islam. Secara substansial, ajang silaturahmi bersama aparat pemerintah di sini memiliki tujuan utama untuk membumikan keislaman di bumi Madura secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berkenaan dengan ini, KH. H Nawawi Toha selaku informan kunci menjelaskan:

“AUMA datang ke kepolisian, pemerintahan, atau mengajak adanya kegiatan-kegiatan apalah yang islami. Umpamanya dulu yang sering dilakukan AUMA adalah di hari-hari besar Islam. Mengajak pemerintah setempat untuk kerjasama. Dari pemerintah pengadaannya pemerintah yang mengisi adalah AUMA dulu”.<sup>46</sup>

Jika mendasarkan pada keseluruhan penjelasan di atas, nampak jelas bahwa agenda dakwah AUMA selain memfokuskan diri pada penguatan dan penyadaran di kalangan akar rumput, mereka turut juga memanfaatkan varian jalur birokratis melalui aspek kekuatan dan kekuasaan kaum birokrat dan aparat pemerintah. Dalam perspektif yang luas, upaya melalui jalur ke pemerintahan dapat pula dikatakan sebagai ikhtiar politis, yakni memanfaatkan sumber atau jaringan kekuatan atau kekuasaan kelompok tertentu. Salah satunya adalah turut terlibat aktif melakukan komunikasi dan menjalin kerja sama dengan *platform* kelompok atau ideologi politik tertentu.

## Penutup

Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang eksis di beberapa tahun terakhir ini, AUMA tidak saja bergerak dalam wilayah keagamaan *an sich*, namun juga bergerak dalam wilayah politis. Sebagai

<sup>46</sup> KH. H Nawawi Toha, *Wawancara*, Pamekasan 4 Juni 2018.

gerakan keagamaan Islam, organisasi ini diikat oleh visi mengantisipasi dan menghindarkan Indonesia, khususnya masyarakat Madura, dari segala ragam deviasi ajaran dan paham keagamaan. Terdapat empat jenis penyimpangan keagamaan yang menjadi sasaran utama, yakni Shi'ah, Wahabi, Liberal, dan penistaan agama, yang kemudian disingkat oleh mereka menjadi SYIBILIP. Keempat pemahaman ini adalah musuh besar. Adapun menyebut AUMA sebagai ormas keagamaan yang bergerak di wilayah politis merujuk pada peran dan fungsi strategis mereka yang aktif melibatkan diri dalam banyak dinamika politik, baik di level daerah maupun pusat. Di level daerah, peran dan fungsi strategis politik organisasi ini terilustrasi secara jelas dalam kerja sama politik yang mereka bangun bersama elit partai politik di tingkat daerah. Sedangkan di level nasional, peran strategis organisasi ini mereka tunjukkan melalui keterlibatan diri dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Hal ini sebagaimana diperlihatkan oleh KH. Ali Karrar Shinhaji, terutama ketika hadir sebagai perwakilan ulama Madura ke ijtimak ulama Jakarta.

Secara umum, organisasi AUMA menjalankan agenda dakwah dan politik mereka ditempuh melalui dua strategi. *pertama*, penguatan posisi mereka di sektor struktural. Penguatan di sektor struktural adalah usaha yang dibangun melalui jalan politis, seperti halnya menjalin komunikasi dengan seluruh jajaran kepala daerah dan melakukan kontrol ketat terhadap jalannya perundangan. Persisnya, mensinergikan segala peraturan daerah Pamekasan dengan nilai-nilai keislaman (syariah). Strategi ini menjadi momentum paling dominan, di mana AUMA melakukan produksi dan reproduksi kekuasaan. *Kedua*, pergerakan melalui cara kultural. Cara ini merujuk pada segala bentuk kegiatan dakwah mereka yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Umumnya, cara ini ada kalanya mereka lakukan secara persuasif, seperti musyawarah dan dialog, namun dalam batasan-batasan tertentu, pun juga mereka lakukan dengan cara preventif dan represif. Melakukan penggeladahan dan aksi penutupan paksa, seperti aksi yang mereka lakukan di desa Ponteh, dan penutupan tempat hiburan karaoke di Tlanakan Pamekasan.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Hamdi, Ahmad Zainul. “Klaim *Religious Authority* dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang Madura, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Hannan, Abd. “Fanatisme dan Stigma Sosial Pesantren Miftahul Ulum terhadap Kelompok Muhammadiyah di Pamekasan”. Tesis--Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2017.
- Hariyanto, Erie. “Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan”, *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 15, No. 1, 2012.
- Heidux, Felix. “Between a Rock and a Hard Place: Radical Islam in Post-Suharto Indonesia”, *International Journal of Conflict and Violence*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Herdiansah, Ari Ganjar., Junaidi., dan Ismiati, Heni. “Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Idahram, Syekh. *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Masduki, Hendri. “Perspektif Sosiologis Konsep Kebijakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) di Kabupaten Pamekasan: Jawaban terhadap Wacana Pemisahan Agama dengan Politik”, *Jurnal El-Furqonia*, Vol. 05, No. 02, 2017.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Penulis, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Pribadi, Yanwar. “Kiai in Madura: Their Roles in Local Politics in Indonesia”, *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 29, No. 3, 2012.
- Pribadi, Yanwar. “Relasi Kiai, Masyarakat, dan Negara: Konfigurasi Politik Pemilu pada Masa Orde Baru di Madura”, *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- . “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture”, *al-Jamiab: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No. 2, 2013.
- . “Renegotiating Islam: The Kiai and People’s Resistance against the Government in the 1993 Nipah Dam Incident in Sampang,

- Madura”, *The 13th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, 2013.
- . “The Suramadu Bridge Affair: Un-bridging the State and the Kiai in New Order Madura”, *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Sattar, Abdullah. “Badan Silaturahmi Ulama Madura (BASSRA): Dakwah Multi Fungsi”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Shinhaji, KH Ali Karrar (Ketua AUMA). *Wawancara*. Pamekasan 1 Agustus 2017.
- . *Wawancara*. Pamekasan 22 Juni 2017
- Suharso, Pudjo. “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah: Tinjauan Elemen Masyarakat”, *al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, Vol. 16, 2006.
- Tim Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’at Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan, *Buku Saku Gerbang Salam: Mengenal Gerbang Salam*. Pamekasan: LP2SI Pamekasan, 2011.
- Toha, KH. H Nawawi. (Ketua AUMA Pamekasan). *Wawancara*. Pamekasan 6 Agustus 2018.
- . *Wawancara*. Pamekasan 6 Juni 2018.
- . *Wawancara*. Pamekasan 4 Agustus 2018.
- Touwen-Bouwsma, Elly. “The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Administration,” dalam Mart Bax et.al (eds.), *Faith and Polity on Religion and Politics*. Amsterdam: VU University Press, 1992.
- Fadholi, KH Imadul Haq (Sekretaris FKM). *Wawancara*. Pamekasan 6 November 2016.
- Idris, Ahnu (Ketua Ormas Gerakan Santri dan Pelajar Rahmatan Lil’alamin (GESPER), *Wawancara*, Pamekasan 17 Agustus 2016.
- Karrar, KH. Umar Hamdan (Ketua FKM). *Wawancara*. Pamekasan 30 Juli 2017.
- . *Wawancara*. Pamekasan 30 Juli 2017.
- . *Wawancara*. Pamekasan 30 Juli 2017.
- “Antisipasi Masuknya Paham Wahabi dan Syiah, AUMA Dideklarasikan”, dalam <http://maduranewsmedia.com/terkini/Diakses> 12 Februari 2018.

- “Kiai Se-Jawa Madura Desak Pembubaran Ahmadiyah” dalam [www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509](http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509) /Diakses 5 April 2017.
- “Sunni Syiah: Politik Penyesatan dan Politik Kewargaan” dalam <http://liputanIslam.com/opini/Diakses> 27 Juni 2017.
- “Tunjuk Pengacara: Aliansi Ulama Madura Akan Laporkan Ahok ke Polda Jatim” dalam <http://portalmadura.com/Diakses> 2 Mei 2018.
- “Ulama dan Warga Segel Hotel Bintang” (27/ 4/2011), <https://www.liputan6.com/news/read/331680/ulama-dan-warga-segel-hotel-bintang>, diakses pada 24 Agustus 2018.
- “Ulama Madura: LGBT Ancam Keberlangsungan Peradaban Manusia”, dalam <http://news.okezone.com/read/2016/02/19/519/1316657/Diakses> 27 Juli 2017.
- “Ulama NU Pamekasan Kecam Keras Sikap Ahok Terkait Persoalan Ini”, dalam [surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses](http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses) 8 Juni 2017; “Ulama NU Pamekasan Siapa Melawan Ahok”, dalam [surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses](http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/02/Diakses) 8 Juni 2017.
- “Ulama Se-Madura Laporkan Ahok ke Polda” dalam <http://beritaotomatis.blogspot.co.id/2016/10/Diakses> 27 Januari 2018.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13858>
- <http://www.suaranews.co/2017/02/ulama-madura-kami-menolak-tegas.html>